



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. DR. SAM RATULANGI NO. 101 Palu, Kode Pos 94111

Telp. (0451) 453750 – 421411- 421412 - 421812

Email : birohukumsulteng@gmail.com, Website www.jdih.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 188.34/228/RO.HUK/2021

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.**

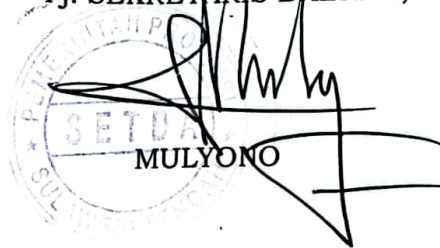
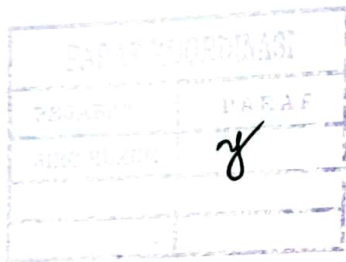
KESATU : **Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.**

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 188.34/228/RO.HUK/2021
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

No (1)	Jenis (2)	Tentang (3)	Materi Pokok (4)	Status (5)		Perintah (6)	Disertai (7)		Unit/Instansi Terkait (8)	Target Penyampaian (9)	Ket. (10)
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau keterangan			
1.	Raperda	Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2039.	- Tujuan, kebijakan dan stragi penataan ruang - Rencana struktur ruang - Rencana pola ruang - Arahana/ketentuan pemanfaatan ruang - Arahana/ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang	Baru		- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang - UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP Nomor 26 Tahun 2021			1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 2. PD dan Instansi Vertikal terkait di Daerah Biro Hukum	Tahun 2022	Lanjutan Tahun 2021
2.	Raperda	Pendidikan Daerah		Baru		- UU Nomor 20 Tahun 2003 - UU Nomor 23 Tahun 2014			1. Dinas Pendidikan dan Kebuyaan 2. Biro Hukum	Tahun 2022	Lanjutan Tahun 2021

3.	Raperda	Penyenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Baru		- UU Nomor 23 Tahun 2014 - UU Nomor 11 Tahun 2020 - PP Nomor 6 Tahun 2021 - PP Nomor 5 Tahun 2021			1. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu 2. Biro Hukum	Tahun 2022	Lanjutan Tahun 2021
4.	Raperda	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1. Pemenuhan Hak Anak 2. Perlindungan khusus anak 3. Perkawinan usia anak 4. Kebijakan kabupaten/kota layak anak 5. Pembinaan dan pengawasan 6. pendanaan	Baru		- UU Nomor 16 Tahun 2019 Jo UU Nomor 1 Tahun 1974 - Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang P3A sesuai UU No. 23 Tahun 2014			1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Biro Hukum	Tahun 2022	Lanjutan Tahun 2021, dan Mengubah Judul Ranperda
5.	Rapreda	- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026		Baru		- UU Nomor 25 Tahun 2004 - UU Nomor 26 Tahun 2007 - UU Nomor 23 Tahun 2014 - UU Nomor 11 Tahun 2020 - PP Nomor 8 Tahun 2008 PP Nomor 26 Tahun 2008			1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Hukum	Tahun 2022	Lanjutan Tahun 2021

6.	Raperda	- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	- Retribusi izin usaha perikanan		Ubah	- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PP Nomor 10 Tahun 2021			1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi 3. Biro Hukum	Tahun 2022	
7.	Raperda	- Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan	- Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tengah Sesuai Kewenangan Pemerintah Daerah	Baru		- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan			1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Biro Hukum	Tahun 2022	
8.	Raperda	- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	- Perumpunan dan Penguatan Kelembagaan beberapa Perangkat Daerah Provinsi.		Ubah	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah			1. Biro Organisasi 2. Biro Hukum	Tahun 2022	

9.	Raperda	- Bangunan Gedung	- fungsi bangunan Gedung. - Persyaratan bangunan Gedung, penyelenggaraan bangunan Gedung. - hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan Gedung - peran masyarakat - pembinaan pemerintah - sanksi	Baru		- UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung - PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			1. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 3. Dinas Pemukiman dan Pertanahan 4. Biro Hukum	Tahun 2022	
10.	Raperda	- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Kontruksi	- Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada SubUrusan jasa Konstruksi - Kebijakan Khusus - Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan Jasa Konstruksi - Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Daerah Provinsi		Ubah	- UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi			1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 2. Biro Hukum	Tahun 2022	

11.	Raperda	- Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pengelolaan Keuangan Daerah	Baru		- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020			1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Biro Hukum	Tahun 2022	
12.	Raperda	- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah	-		Ubah	- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara			1. Biro Ekonomi dan Pembangunan 2. PT Pembangunan Sulteng 3. Biro Hukum	Tahun 2022	
13.	Raperda	- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Dari Perusahaan Daerah	-		Ubah	- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara			1. Biro Ekonomi dan Pembangunan 2. PT Bank Sulteng 3. Biro Hukum	Tahun 2022	

		Menjadi Perseroan Terbatas (PT)									
14.	Raperda	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Baru		- PP Nomor 12 Tahun 2019			1. BPKAD 2. Biro Hukum	Tahun 2022	
15.	Raperda	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Baru		- PP Nomor 12 Tahun 2019			1. BPKAD 2. Biro Hukum	Tahun 2022	
16.	Raperda	- Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Baru		- PP Nomor 12 Tahun 2019			1. BPKAD 2. Biro Hukum	Tahun 2022	

17	Raperda	- Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga	- Kepemudaan - Olahraga - Pramukaan	Baru		- Kewenangan Badan Kepemudaan dan Olahraga Lampiran Huruf S UU Nomor 23 Tahun 2014 - UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan - UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional			1. DISPORAN 2. Biro Hukum	Tahun 2022	
----	---------	---	---	------	--	--	--	--	------------------------------	------------	--

PANGKALAN	
PARAF	
RUMAH	

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PJ. SEKRETARIS DAERAH,


MULYONO